

**PENINGKATAN PAD PENGARUHNYA PADA PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SISTEM PEMUNGUTAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECEMATAN JUMAPOLO**

**Destin Anggara Sartika Siwi<sup>1</sup>, Suprihati<sup>2</sup>, Rukmini<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi, Institut Bisnis Teknologi AAS, Kota Sukoharjo, Negara Indonesia

Correspondence		
Email: <a href="mailto:destinanggara7@gmail.com">destinanggara7@gmail.com</a> <sup>1</sup> , <a href="mailto:suprihati4566@gmail.com">suprihati4566@gmail.com</a> <sup>2</sup> , <a href="mailto:rukmini.stie.aas@gmail.com">rukmini.stie.aas@gmail.com</a> <sup>3</sup>	No. Telp:	
Submitted 7 Juli 2025	Accepted 10 Juli 2025	Published 11 Juli 2025

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Pemungutan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pad Di Pemerintahan Kecamatan jumapolo. dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang dengan pengambilan sampel menggunakan teknik porpose sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Peraturan pajak, Sanksi pajak, dan Sistem Pemungutan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di kecamatan jumapolo.

**Kata Kunci:** Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pemungutan Wajib Pajak

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Tax Regulations, Tax Sanctions, and Land and Building Tax Collection System on PAD in the Jumapolo District Government. in this study were 100 people with sampling using purpose sampling techniques. This type of research is quantitative research with data collection through primary data using questionnaires distributed to respondents. The data analysis method uses SPSS. The results of the study indicate that the variables Tax Regulations, Tax Sanctions, and Land and Building Tax Collection System have a significant effect on PAD in the Jumapolo District.*

**Keywords:** Tax Regulations, Tax Sanctions, Tax Collection System

**Pendahuluan**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan, dan dikelola baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tergantung pada jenis objek pajaknya. Dalam konteks otonomi daerah, PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) telah mengalami desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemungutan dan pemanfaatan hasilnya secara mandiri.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Dewi, 2023) Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah terkait. Meskipun PBB memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan daerah, wajib pajak perlu menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut. Selain itu, pemahaman yang jelas tentang besaran kewajiban pajak properti dan konstruksi diperlukan dalam proses pemungutan maupun pembatalan pajak jenis ini.

Alasan diadakannya penelitian ini adalah untuk Bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah (BPD) Kecamatan Jumapolo berupaya memaksimalkan peningkatan penerimaan PBB secara keseluruhan pada setiap akhir tahun. Namun, pihaknya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendapatan dari PBB tidak merata karena masih banyak wajib pajak yang terlambat atau belum melunasi

kewajiban pajaknya. Kendala ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidak patuhan wajib pajak terhadap regulasi, perbedaan tingkat pendapatan, kurangnya pemahaman wajib pajak, dan sanksi atas tunggakan yang belum diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, banyak hambatan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Pertanyaan tujuan dari penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh peraturan Pajak, sanksi, dan sistem pemungutan wajib pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan di Kecamatan Jumapolo bertujuan untuk mengetahui pengaruh peraturan pajak, sanksi pajak, dan sistem pemungutan wajib pajak terhadap PAD di jumapolo.

### Tinjauan Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini pajak bumi dan bangunan Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Pemungutan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pad Di Pemerintahan Kecamatan Jumapolo pada interaksi Peran pemerintah dalam pengawasan perpajakan sangat penting hal ini untuk memastikan kepatuhan dan integritas sistem perpajakan. Melalui pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang adil, dan edukasi yang menyeluruh, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi waib pajak untuk memenuhi kewajiban masyarakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peraturan pajak, Sanksi pajak dan sistem pemungutan wajib pajak dampak signifikan terhadap PAD. Gabriella & Frederica (2024). menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh kesadaran wajib pajak dan transparansi perpajakan, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Widjaja (2014) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal membutuhkan aturan yang jelas agar daerah dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dari penelitian.

Berdasarkan tinjauan teoritis ini, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: : Peraturan Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)..

H3: Sistem Pemungutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menyebarkan Kuisisioner yang bertujuan untuk mengetahui Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sistem Pemungutan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pad Di Pemerintahan Kecamatan Jumapolo. Desain ini memungkinkan pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat diolah secara statistik untuk mendapatkan temuan yang objektif dan dapat diandalkan. Dengan pendekatan kuantitatif, peneliti dapat mengukur hubungan antar variabel dengan lebih tepat dan menghasilkan rekomendasi yang berbasis data.

Objek penelitian ini berfokus pada masyarakat Kabupaten jumapolo yang pernah melakukan pembayaran pajak bumi dan. Populasi yang diteliti terdiri dari 45.264 jiwa. yang terdaftar dalam Data 2023. Dari populasi tersebut, sebanyak 100 responden dipilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih responden berdasarkan kriteria tertentu..

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua metode utama. Pertama, kuesioner yang terdiri dari pertanyaan yang menggunakan link akan disebarakan kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai pembayran pajak bumi dan bangunan. Kuesioner ini menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap responden terhadap setiap pernyataan.

pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi yang diteliti.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang beberapa variabel yang perlu didefinisikan secara operasional. Pertama, peraturan pajak (X1) adalah ketentuan atau kebijakan yang mengatur kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, diukur berdasarkan tingkat pemahaman, kejelasan, dan kemudahan dalam penerapannya. Kedua, sanksi pajak (X2) merujuk pada bentuk hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak atas pelanggaran perpajakan, diukur melalui tingkat ketegasan, efek jera, dan konsistensi penerapan sanksi. Ketiga, sistem pemungutan wajib pajak (X3) mengacu pada metode dan mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah, diukur berdasarkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan proses pemungutan. Terakhir, pendapatan asli daerah (Y) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan lokal, diukur melalui total penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Definisi operasional ini dirancang untuk mempermudah pengukuran dan analisis variabel dalam penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas—dalam hal ini PAD—terhadap variabel terikat, yaitu Peraturan pajak, sanksi pajak, sistem pemungutan. Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu akan dilaksanakan uji validitas dan reliabilitas guna memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan juga pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, untuk memastikan kelayakan model regresi. Hasil analisis ini nantinya akan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah penelitian serta membahas makna dan dampak dari temuan yang diperoleh.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang mengisi Kuisioner Data responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki, yaitu sebanyak 54 orang sedangkan responden perempuan berjumlah 48 orang.

Berdasarkan usia, responden terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok usia 30-40 tahun merupakan mayoritas dengan 51 orang. Berdasarkan tingkat Pendidikan kelompok yang paling banyak ada di Pendidikan SMA yaitu 54 orang, dan berdasarkan pekerjaan yang paling banyak adalah lainnya atau karyawan swasta 42 orang.

#### a. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi nilai pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Hasil perhitungan menggunakan rumus linier berganda dengan bantuan program SPSS dapat diperoleh hasil pada tabel berikut:  $\hat{Y} = 6.525 + 0.221X1 + 0.235 X2 + 0.370 X3 + e$

#### b. Uji F dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh simultan variable bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. $(34.157 > 2,70)$ hal tersebut diperkuat dengan probabiliti signifikansi $0,000 < 0,05$ , maka dengan demikian hipotesis yang dikemukakan diterima atau dengan kata lain $H_0$ ditolak dan $H_3$ diterima. Dapat disimpulkan bahwa peraturan pajak (X1) sanksi pajak (X2) sistem pemungutan (X3) berpengaruh bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah (Y).

#### c. Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh parsial dan signifikansi variable bebas terhadap variabel terikat dengan membandingkan t hitung dengan t tabel

1. X1: nilai signifikansi variable Peraturan Pajak sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $5,539 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah.
2. X2: nilai signifikansi variable sanksi Pajak sebesar  $0,004 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,938 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah.
3. X3: bahwa nilai signifikansi variable Peraturan Pajak sebesar  $0,002 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $3,208 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable sistem pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah.
- d. Uji determinasi dapat diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0.501. hal tersebut berarti sebesar 50,1% pendapatan asli daerah dijelaskan peraturan pajak, sistem pajak, sistem pemungutan pajak. Sedangkan sisanya 49,9% dijelaskan oleh variabel lain.

### Pembahasan

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data Berdasarkan tabel regresi diketahui bahwa nilai signifikansi variable Peraturan Pajak sebesar  $0,048 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $1,948 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah. Berdasarkan tabel regresi diketahui bahwa nilai signifikansi variable Peraturan Pajak sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $5,539 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel regresi diketahui bahwa nilai signifikansi variable sanksi Pajak sebesar  $0,004 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $2,938 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah

Berdasarkan tabel regresi diketahui bahwa nilai signifikansi variable Peraturan Pajak sebesar  $0,049 < 0,05$  dan nilai t hitung sebesar  $1,994 > t$  table 1,660 maka dapat disimpulkan bahwa variable sistem pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable pendapatan asli daerah

### Kesimpulan

Variabel Tingkat Peraturan Pajak (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 dimana nilai tersebut dibawah 0.05. Semakin tinggi tingkat peraturan yang dimiliki oleh seorang Wajib pajak maka berpengaruh baik terhadap peraturan pajak.

Variabel Sanksi pajak (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 dimana nilai tersebut dibawah 0,05. Semakin besar sanksi pajak yang diberikan ketika melakukan pelanggaran maka akan berpengaruh terhadap tingkat PAD.

Sistem Pemungutan Pajak (X3) memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana nilai tersebut dibawah 0,05. Semakin tinggi Pengetahuan Pajak yang dimiliki maka akan berpengaruh baik terhadap tingkat PAD.

### Keterbatasan Dan Saran

Keterbatasan Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, keterbatasan sampel dan kemampuan peneliti

Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuisioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuisioner sehingga ada kemungkinan hasilnya kurang akurat

Saran Bagi pemerintah Kecamatan Jumapolo diharapkan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan secara intensif agar wajib pajak/masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk melakukan pembayaran PBB P-2 dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

**Daftar Pustaka**

- Anggara, D. M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DI PROVINSI DKI JAKARTA. *Jurnal Mahasiswa LPPM STIE-GK Muara Bulian*, 1(1),195–208.
- Dewi, N. F. (2023). Prosedur Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P-2) Dengan Sistem Polling Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- Gabriella Nella, & Frederica Diana. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Halim, M. (2020). Peran Penilaian Objek Pajak dalam Sistem Perpajakan. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan*, 8(3), 123–134.
- Herdiana Riska (2016) “*Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Setelah Penetapan UU No.28 Tahun 2009 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Kabupaten Sragen Thun 2010-2014.*” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Masitoh Siti (2018) “*Analisis Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*” IAIN Purwokerto.
- M Steers Richard (1986). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008–6021.
- Widjaja HAW. (2014). *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.